



KANWIL KEMENTERIAN HUKUM JAWA BARAT

 KANWIL KEMENTERIAN HUKUM JAWA BARAT	NOMOR SOP	W.11--HH.01.03-15
	TANGGAL PEMBUATAN	Januari 2019
	TANGGAL REVISI	10 Februari 2025
	TANGGAL EFEKTIF	10 Februari 2025
	DISAHKAN OLEH	KEPALA KANTOR WILAYAH  ASEP SUTANDAR
NAMA SOP :	SOP Uji Konsekuensi dan Penetapan Daftar Informasi yang Dikecualikan	
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik4. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Kementerian Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki pengetahuan mengenai UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan turunannya2. Jabatan Fungsional Umum/Jabatan Fungsional Tertentu Pranata Humas, Arsiparis, Pranata Komputer3. Memiliki keterampilan kerja yang dapat menunjang tugas pelayanan informasi serta mampu berkomunikasi dengan baik	
KETERKAITAN:	PERALATAN / PERLENGKAPAN :	
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer/Laptop2. Akses internet3. Printer, Scanner4. Formulir Layanan Informasi Publik5. ATK	
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan mengganggu tugas dan fungsi pelayanan informasi publik	Disimpan dalam bentuk data elektronik dan fisik	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
UJI KONSEKUENSI DAN PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

No	Kegiatan	PELAKSANA		MUTU BAKU			KETERANGAN
		PPID Kementerian	PPID Satuan Kerja	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Meminta usulan informasi publik yang diidentifikasi sebagai informasi rahasia (informasi yang dikecualikan)			Surat / Nota Dinas	1 hari kerja	Surat / Nota Dinas	
2	Mengumpulkan bahan informasi yang dikecualikan sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja			Dasar hukum pengelolaan PPID dan Dasar hukum kearsipan	7 hari kerja	Bahan informasi yang dikecualikan	
3	Melakukan uji konsekuensi berdasarkan UU, keputusan dan kepentingan atas informasi yang dikecualikan			Dasar hukum pengelolaan PPID	3 hari kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil Uji Konsekuensi - Berita Acara Uji Konsekuensi - Usulan daftar informasi yang dikecualikan 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat dilaksanakan dalam rapat bersama antara PPID Kementerian dengan PPID Satuan Kerja; - Dapat dilaksanakan secara mandiri oleh PPID Satuan Kerja dengan unit teknis penghasil informasi.
4	Menetapkan daftar informasi yang dikecualikan			Usulan daftar informasi yang dikecualikan	2 hari kerja	SK Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	
					13 hari kerja		